KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 26 Juni, 2020

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Halaman 7	Jumat, 26 Juni 2020	Subsidi Tak Berpihak ke Konsumen (Bisnis Indonesia, Halaman 7)	Bank Dunia menilai skema subsidi properti di Indonesia cenderung menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen sehingga program perumahan yang diterapkan pemerintah tidak efektif dan efisien. Dao Harrison, Senior Housing Specialist di Bank Dunia, menyatakan rumah bersubsidi yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang kurang baik dan dibangun di daerah yang kurang strategis.
2	Kompas (Halaman, 11)	Jumat, 26 Juni 2020	Sumsel dan Bengkulu Bangun Dua Ruas Jalan	Dua ruas jalan penghubung antara Bengkulu dan Sumatera Selatan akan dibangun pada 2021. Terobosan ini akan memperpendek jarak tempuh arus barang dan arus orang sehingga perekonomian daerah tumbuh pesat.
3	Bisnis Indonesia, Halaman 7	Jumat, 26 Juni 2020	Subsidi Tak Berpihak ke Konsumen	Bank Dunia menilai skema subsidi properti di Indonesia cenderung menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen sehingga program perumahan yang diterapkan pemerintah tidak efektif dan efisien. Dao Harrison, Senior Housing Specialist di Bank Dunia, menyatakan rumah bersubsidi yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang kurang baik dan dibangun di daerah yang kurang strategis.
4	Kompas, Halaman 11	Jumat, 26 Juni 2020	Sumsel dan Bengkulu Bangun Dua Ruas Jalan	Dua ruas jalan penghubung antara Bengkulu dan Sumatera Selatan akan dibangun pada 2021. Terobosan ini akan memperpendek jarak tempuh arus barang dan arus orang sehingga perekonomian daerah tumbuh pesat.
5	antaranews.com	Kamis, 25 Juni 2020	Kementerian PUPR dorong PLBN sebagai pusat ekonomi kawasan perbatasan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. https://www.antaranews.com/berita/1574028/kementerian-pupr-dorong-plbn-sebagai-pusat-ekonomi-kawasan-perbatasan
6	antaranews.com	Kamis, 25 Juni 2020	PUPR: Progres sarana penunjang pos lintas batas negara Skouw 91 persen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan progres pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua mencapai 91,99 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. https://www.antaranews.com/berita/1573974/pupr-progres-sarana-penunjang-pos-lintas-batas-negara-skouw-91-persen
7	antaranews.com	Kamis, 25 Juni 2020	Proyek irigasi diperlukan untuk capai ketahanan pangan nasional	Proyek irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP), yang dirancang untuk memenuhi target pembangunan pertanian nasional dinilai sangat diperlukan untuk mencapai target ketahanan pangan di tanah air. https://www.antaranews.com/berita/1573737/proyek-irigasi-diperlukan-untuk-capai-ketahanan-pangan-nasional
8	beritasatu.com	Jumat, 26 Juni 2020	Program Padat Karya Absah Kempupera Berjalan di 79 Lokasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) telah menyalurkan program pembangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (Absah) melalui Padat Karya Tunai (PKT) tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, khususnya untuk mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. https://www.beritasatu.com/bisnis/649151/program-padat-karya-absah-kempupera-berjalan-di-79-lokasi

9	validnews.id	Jumat, 26 Juni 2020	Progres Fisik Program Absah Kementerian PUPR Capai 55%	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mengalokasikan Rp 11,44 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT) rutin di tahun 2020. Hingga pertengahan Juni 2020, baru 17,9 persen yang tersalurkan dari total anggaran. https://www.beritasatu.com/nasional/648979/hingga-juni-program-padat-karya-kempupera-baru-tersalurkan-rp-216-t
10	money.kompas.com	Kamis, 25 Juni 2020	Gandeng Kementerian PUPR dan Kemhan, Kementan akan Jadikan Kalteng Lumbung Pangan	Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menjadikan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai lumbung pangan di masa depan. https://money.kompas.com/read/2020/06/25/190655626/gandeng-kementerian-pupr-dan-kemhan-kementan-akan-jadikan-kalteng-lumbung
11	merdeka.com	Kamis, 25 Juni 2020	Kementerian PUPR Targetkan Sertifikasi 113.900 Tenaga Kerja Konstruksi	Kementerian PUPR Targetkan Sertifikasi 113.900 Tenaga Kerja Konstruksi. Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang tenaga kerja konstruksi. https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/1191753/20200625203024-kementerian-pupr-targetkan-sertifikasi-113900-tenaga-kerja-konstruksi-001-debby-restu-utomo.html
12	timesindonesia.co.id	Kamis, 25 Juni 2020	Kementerian PUPR RI: Pengembangan PLBN Terpadu Skouw Capai 91,99 persen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw (PLBN Terpadu Skouw) di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/279686/kementerian-pupr-ri-pengembangan-plbn-terpadu-skouw-capai-9199-persen
13	timesindonesia.co.id	Kamis, 25 Juni 2020	Kementerian PUPR RI: Pagu Indikatif RAPBN 2021 Sebesar Rp 115,58 Triliun	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) menyampaikan pagu indikatif Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sebesar Rp 115,58 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 140,33 triliun. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/279638/kementerian-pupr-ri-pagu-indikatif-rapbn-2021-sebesar-rp-11558-triliun
14	ekonomi.bisnis.com	Jumat, 26 Juni 2020	Pelanggaran Sempadan Sungai: Menteri PU Bongkar Sheetpile Waterpark Dwisari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membongkar sheetpile Waterpark Dwisari yang berada di tepi Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki izin lingkungan. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200626/45/1257919/pelanggaran-sempadan-sungai-menteri-pu-bongkar-sheetpile-waterpark-dwisari-

Judul	**Subsidi Tak Berpihak ke Konsumen (Bisnis Indonesia, Halaman 7)**	Tanggal	Jumat, 26 Juni 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 7		
Resume	Bank Dunia menilai skema subsidi properti di Indonesia cenderung menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen sehingga program perumahan yang diterapkan pemerintah tidak efektif dan efisien. Dao Harrison, Senior Housing Specialist di Bank Dunia, menyatakan rumah bersubsidi yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang kurang baik dan dibangun di daerah yang kurang strategis.		

| PEMBIAYAAN PERUMAHAN |

SUBSIDI TAK BERPIHAK KE KONSUMEN

Bisnis, JAKARTA — Bank Dunia menilai skema subsidi properti di Indonesia cenderung menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen sehingga program perumahan yang diterapkan pemerintah tidak efektif dan efisien.

Mutiara Nabila
mutiara.nabila@bisnis.com

Dao Harrison, Senior Housing Specialist di Bank Dunia, menyatakan rumah bersubsidi yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang kurang baik dan dibangun di daerah yang kurang strategis.

"Skema-skema yang ada saat ini cenderung menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen, dan membuat hengkangnya sektor swasta," katanya, dalam *webinar*, Kamis (25/6).

Dia melanjutkan belanja publik dari pemerintah untuk program perumahan juga lebih banyak membebani anggaran biaya fiskal dan terus meningkatkan utang.

Dia mencatat skema subsidi yang ada seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pangsanya terlalu besar dibandingkan dengan skema subsidi lainnya.

Dengan kondisi itu, Harrison menilai sering kali target tahunan BSPS tidak tercapai, seperti yang terjadi pada 2017 dan 2018.

Ketidakefektifan BSPS juga dikarenakan sebagian besar program BSPS beroperasi di daerah perdesaan. Padahal, sebagian besar rumah dengan kualitas tidak layak huni berada di daerah perkotaan, terutama di kawasan kumuh.

Dia juga menilai desain skema subsidi seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga (SSB) juga memakan banyak biaya dan kurang tepat sasaran.

"Walaupun subsidi KPR [kredit pemilikan rumah] ini telah membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai target kuantitatifnya, subsidi tersebut memakan biaya yang mahal dan kemungkinan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, menciptakan utang jangka panjang, dan risiko tingkat bunga," paparnya.

Dia menghitung baik FLPP ekonomi pada masa depan, dan biaya administrasi jangka panjang bagi pemerintah," jelasnya.

Harrison menyebutkan bahwa anggaran belanja pemerintah di sektor perumahan, terutama yang ditujukan untuk penyediaan rumah murah masih belum efektif.

Oleh karena itu, dia merekomendasikan sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar anggaran belanja untuk subsidi perumahan tak membebani fiskal.

"Salah satunya dengan mengalihkan dana publik ke skema subsidi yang lebih progresif seperti BP2BT yang akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja," tegasnya.

Bila Indonesia tetap mengandalkan dan mengoptimalkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dia menyarankan perlunya dikurangi kontribusi likuiditas pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan suku bunga pada saat pinjaman dimulai atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembayaran dari penerimanya.

Pemerintah juga bisa meningkatkan kapasitas PT Sarana Multigriya Finansial untuk memanfaatkan pendanaan pasar modal untuk dukungan likuiditas campuran.

Selain langkah itu, dia menambahkan pemerintah harus memastikan bahwa rumah bersubsidi memiliki kualitas bangunan yang baik dan dibangun di daerah-daerah yang berlokasi strategis.

Untuk itu, Harrison merekomendasikan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertimbangkan beberapa hal, seperti mengembangkan alat kesesuaian lokasi dan pedoman untuk perumahan bersubsidi, termasuk penyaringan lokasi dengan pemetaan bahaya.

Selanjutnya, perlu pengembangan sistem mekanikal dan elektrikal yang kuat dengan menggunakan teknologi *geo-tagging* untuk melacak kualitas dan mengambil tindakan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap standar kualitas.

Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan sistem sertifikasi dan penilaian pengembang nasional bermitra dengan asosiasi real estat dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. "Hal ini untuk menghindari melibatkan pengembang yang berkinerja buruk [di program pemerintah], sambil memberi insentif kepada pengembang yang berkualitas."

Dia juga merekomendasikan pengembangan sistem informasi perumahan dan real estat untuk meningkatkan proses perencanaan dalam mengelola pembangunan perumahan yang terjangkau.

Agar Subsidi Tepat Sasaran

BISA DIPERTIMBANGKAN

Pemerhati properti Panangian Simanungkalit mengatakan penilaian Bank Dunia ada benarnya karena skema seperti FLPP dengan suku bunga 5% selama 20 tahun menjadi biaya yang mahal dan membebani fiskal.

"Kalau SSB [Subsidi Selisih Bunga] itu malah menurut saya lebih efektif karena pemerintah hanya membantu selisih bunga dan tenornya lebih pendek, sehingga yang terjaring lebih banyak," ungkapnya.

Untuk rekomendasi Bank Dunia menggalakkan BP2BT, dia menilai hal itu sulit. "Di Indonesia ini fokusnya pemerintah dan pengembang kan yang penting banyak yang terbangun, sudah ada spesifikasinya juga soal rumah sederhana. Dengan aturan kualitas, bakal sulit terkejar target-target bangun rumah," jelasnya.

> **"Skema-skema yang ada saat ini cenderung menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen, dan membuat hengkangnya sektor swasta.**

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zurna mengatakan bahwa rekomendasi dari Bank Dunia itu bisa diterapkan dengan beberapa pertimbangan.

"Rekomendasi yang ada harus lebih terperinci karena di lapangan menggunakan konsep yang ada sekarang sudah banyak yang bisa berpartisipasi [MBR dan pengembang]," ungkapnya.

Pemerintah juga telah mengatur target yang harus dijalankan dengan aturan dan spesifikasi yang cukup ketat dan terperinci melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Untuk melaksanakan rekomendasi Bank Dunia, perlu diperhatikan lagi kondisi di lapangan. Alasannya, kondisi di tiap wilayah berbeda-beda sehingga aturan yang ada dan yang dibuat harus sesuai dan tidak bisa digeneralisasi. ■

Perkiraan Kenaikan Harga

Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Januari-Maret 2020)

Jumlah (Unit)	Realisasi (Rp)	Provinsi
287	27.439.152.750	Aceh
201	21.034.080.000	Bali
1.956	199.547.994.161	Banten
329	29.569.350.000	Bengkulu
33	3.174.600.000	Daerah Istimewa Yogyakarta
16	1.816.171.875	DKI Jakarta
82	8.044.578.750	Gorontalo
880	84.068.603.436	Jambi
8.971	936.713.504.633	Jawa Barat
1.933	182.655.067.229	Jawa Tengah
2.050	194.525.355.012	Jawa Timur
803	81.747.832.500	Kalimantan Barat
1.437	147.661.950.630	Kalimantan Selatan
405	41.243.161.500	Kalimantan Tengah
333	34.810.019.250	Kalimantan Timur
244	24.935.655.000	Kepulauan Bangka Belitung

maupun SSB memiliki biaya per unit yang tinggi, yaitu Rp58 juta per unit hingga Rp61 juta per unit yang disubsidi. Bila dikalikan dengan jumlah rata-rata unit bersubsidi per tahun sebanyak 260.000 unit, jumlah itu menjadi sekitar Rp14 triliun.

Di berharap Indonesia bisa menyediakan pembiayaan perumahan yang lebih hemat dan untuk jangka panjang, seperti menggencarkan program subsidi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) bekerja sama dengan Bank Dunia. "BP2BT harapannya justru lebih digencarkan karena bisa jadi alternatif. BP2BT menyediakan bantuan uang muka satu kali untuk MBR [masyarakat berpenghasian rendah], mengurangi kewajiban

Penilaian Bank Dunia soal subsidi untuk perumahan Indonesia yang cenderung tak tepat sasaran menjadi gambaran ketidakefektifan program yang bergulir sejak lama. Akibatnya, beban utang untuk menyubsidi perumahan kian membengkak tetapi hasilnya tak efektif. Saat pandemi Covid-19, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi skema subsidi di perumahan agar lebih tepat sasaran.

Properti Residensial Per Wilayah Secara Tahunan (%)

Wilayah	Kuartal I/2020	Kuartal II/2020*
Medan	7,14	4,04
Bandar Lampung	0,60	1,05
Manado	2,30	2,01
Makassar	2,43	2,10
Pekanbaru	1,14	1,56
Jabodetabek-Banten	1,64	1,79
Pontianak	1,67	1,20
Palembang	0,68	1,02
Surabaya	1,91	1,90
Semarang	1,03	1,07
Yogyakarta	0,84	1,27
Bandung	1,22	1,60
Denpasar	0,22	0,80
Banjarmasin	0,47	0,54
Balikpapan	-0,14	0,50
Padang	0,72	0,69
Samarinda	0,16	0,21
Batam	-3,81	-0,31
Gabungan 18 Kota	1,68	1,56

Ket: *) Perkiraan

Bisnis/Amri Hidayat

504	49.890.228.750	Kepulauan Riau
529	50.191.875.000	Lampung
37	3.911.681.250	Maluku Utara
452	49.935.019.875	Nusa Tenggara Barat
90	9.781.522.125	Nusa Tenggara Timur
115	16.175.745.000	Papua
81	11.237.583.750	Papua Barat
1.158	107.670.547.500	Riau
115	11.176.633.500	Sulawesi Barat
1.133	113.827.752.450	Sulawesi Selatan
232	23.576.086.500	Sulawesi Tengah
302	30.659.960.250	Sulawesi Tenggara
260	25.630.187.250	Sulawesi Utara
333	31.629.960.000	Sumatra Barat
1.398	134.374.409.859	Sumatra Selatan
1.321	123.914.294.241	Sumatra Utara
11	1.252.950.000	Maluku
81	8.261.200.464	Kalimantan Utara
28.112	2.822.084.714.490	GRAND TOTAL

Sumber: *Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia, 13 Mei 2020*

Judul	**Sumsel dan Bengkulu Bangun Dua Ruas Jalan**	Tanggal	Jumat, 26 Juni 2020
Media	Kompas (Halaman, 11)		
Resume	Dua ruas jalan penghubung antara Bengkulu dan Sumatera Selatan akan dibangun pada 2021. Terobosan ini akan memperpendek jarak tempuh arus barang dan arus orang sehingga perekonomian daerah tumbuh pesat.		

Sumsel dan Bengkulu Bangun Dua Ruas Jalan

PALEMBANG — Dua ruas jalan penghubung antara Bengkulu dan Sumatera Selatan akan dibangun pada 2021. Terobosan ini akan memperpendek jarak tempuh arus barang dan arus orang sehingga perekonomian daerah tumbuh pesat. Saat bertemu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Sumsel, Kamis (25/6/2020), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, "Ini upaya bersama memperkuat konektivitas." Jalan sepanjang 49 kilometer menghubungkan Suka Raja-Padang Capo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, dengan Jalan Air Kelinsar, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. Kemudian ada peningkatan jalan dari Tajung Iman-Muara Sahung-Air Tembok, Kabupaten Kaur, Bengkulu, ke kawasan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, sepanjang 36 kilometer. (RAM)